



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2022

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PATI TAHUN 2023-2026

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PATI

Jl. Panglima Sudirman No. 12 Kode Pos 59113
Telepon : 0295 – 381932 [http : //dkp.patikab.go.id](http://dkp.patikab.go.id)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah rencana yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada atau mungkin timbul, nilai-nilai, faktor-faktor penentu keberhasilan dan tujuan pembangunan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) untuk jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka menengah (5 tahun) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka pendek atau tahunan (1 tahun). Perangkat daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPD 2023-2026 dikarenakan masa jabatan Bupati Pati adalah 2017-2022, sesuai dengan Inmendagri 70 Tahun 2021 yang mengatur bahwa bagi kabupaten/kota yang masa jabatan bupati/walikota berakhir pada Tahun 2022, penyusunan RKPD kabupaten/kota Tahun 2023 mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026. Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana di maksud memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Wajib dan / atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Secara umum Renstra Perangkat Daerah menjawab 3 pertanyaan dasar yakni: Kemana pelayanan OPD akan di arahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam empat tahun mendatang; Bagaimana mencapainya; Serta langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Secara terperinci, penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan dokumen renstra berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat yang ada dalam lingkup wilayah Kabupaten Pati, serta menjawab tiga pertanyaan dasar yaitu 1) kemana pelayanan Perangkat Daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; 2) bagaimana mencapainya; 3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan. Oleh karena itu maka kualitas penyusunan Renstra akan sangat ditentukan oleh kemampuan untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dan capaian program RPD 2023-2026 kedalam penyusunan Renstra sesuai tugas dan fungsi. Kinerja penyelenggaraan urusan akan sangat mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Pati, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati menyusun Rancangan Awal Rencana Strategis Tahun 2023 – 2026 yang merupakan penjabaran RPD Kabupaten Pati di bidang kelautan dan perikanan dan disesuaikan dengan RPJMD Provinsi dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga akan terjadi kesesuaian rencana pembangunan di setiap tingkatan, khususnya pembangunan di bidang kelautan dan perikanan.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) yang berwawasan 4 (empat) Tahunan, merupakan pejabaran teknis atas RPD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat arah kebijakan dan indikasi rencana program kegiatan dan sub kegiatan setiap bidang kewenangan dan/ atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 4 (empat) tahunan.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2023 – 2026 disusun mengacu pada sejumlah peraturan-perundangan yang digunakan sebagai rujukan, antara lain meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 – 2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan standar Pelayanan Minimal;
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
30. Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan;
31. Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2023 - 2026 disusun untuk memberikan landasan kebijakan operasional bagi seluruh aparat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati baik di jajaran struktural maupun fungsional dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran sesuai tugas, pokok fungsi dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan yang berpedoman pada RPD Kabupaten Pati.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati adalah untuk menjamin konsistensi perencanaan, pemilihan program dan kegiatan prioritas sebagai penjabaran tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan skala prioritas serta alat bantu untuk mengukur kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati pada akhir tahun dalam empat tahun ke depan.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pemahaman yang lengkap, jelas dan utuh, maka Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2023 - 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat deskripsi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan/penyusunan rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat penjelasan tentang peran (tugas pokok dan fungsi) Dinas Kelautan dan Perikanan beserta struktur organisasinya, sumber daya Dinas Kelautan dan Perikanan, gambaran capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan serta uraian tentang tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Mengemukakan tentang berbagai permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan, telaahan terhadap tujuan dan sasaran daerah dalam RPD Tahun 2023 - 2026, telaahan terhadap Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Isu Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam empat tahun ke depan.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat tentang rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta indikasi pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat tentang indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan yang menggambarkan target kinerja yang ingin dicapai dalam masa 4 (empat) tahun mendatang.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

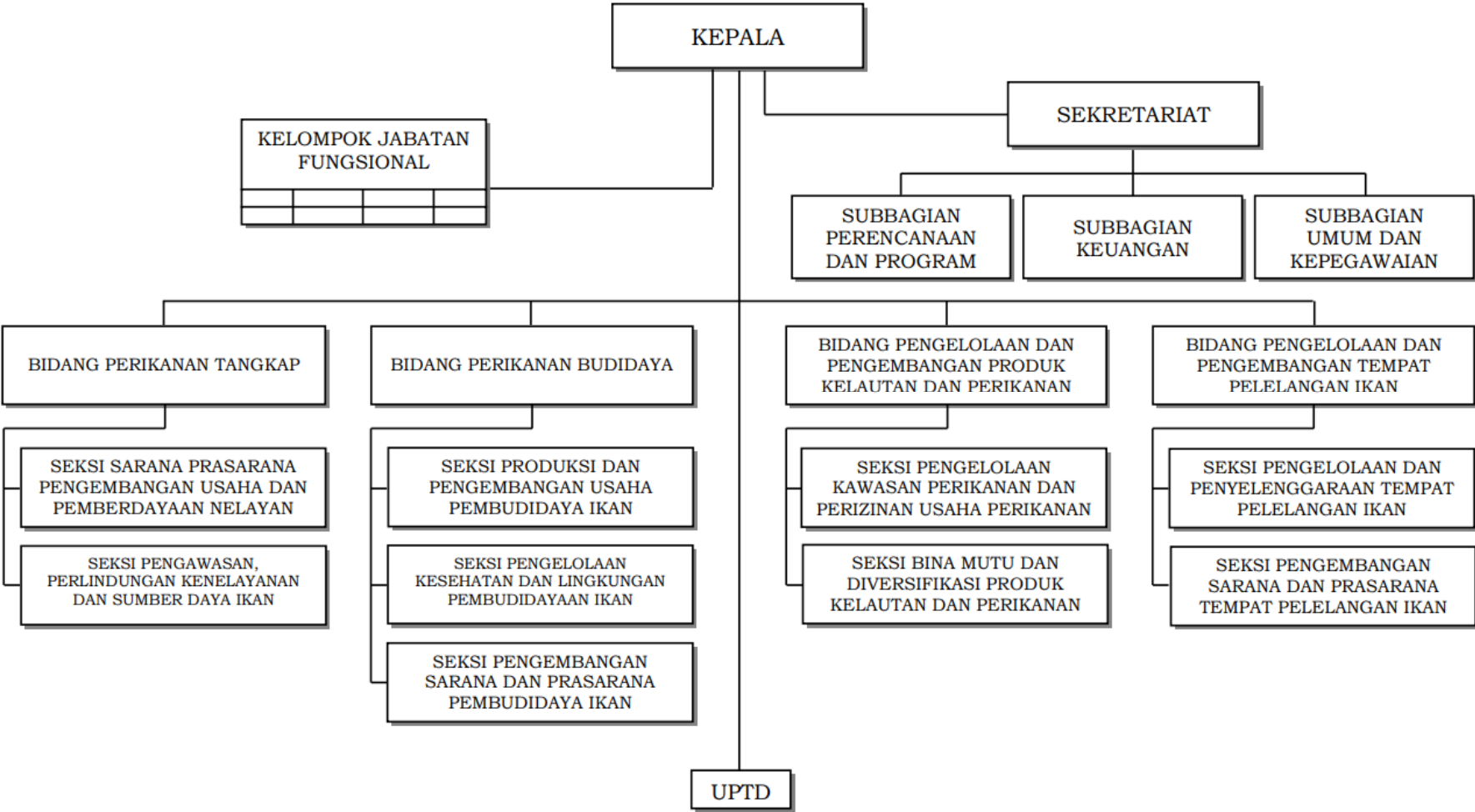
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan, dijabarkan tugas, pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati sebagai berikut :

- a. **Tugas Pokok**
Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- b. **Fungsi**
Dinas dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Untuk menunjang pencapaian tugas, pokok dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati ditopang oleh struktur/ susunan organisasi sebagai berikut :

Gambar 2.1 Bagan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati



Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Subbag Perencanaan dan Program;
 2. Subbag Keuangan;
 3. Subbag Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perikanan Tangkap
 1. Sarana dan Prasarana Kenelayanan;
 2. Seksi Pengawasan, Perlindungan Kenelayanan dan Sumber Daya Ikan;
- d. Bidang Perikanan Budidaya
 1. Seksi Produksi dan Pengembangan Pembudidayaan Ikan;
 2. Seksi Pengelolaan Kesehatan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan;
 3. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan;
- e. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan
 1. Seksi Pengelolaan Kawasan Perikanan dan Perizinan Usaha Perikanan;
 2. Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan;
- f. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan
 1. Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
 2. Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Tempat Pelelangan Ikan;
- g. Kelompok jabatan fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Berdasarkan Susunan Struktur Organisasi yang telah disebutkan sebelumnya masing-masing unsur dalam Organisasi mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Kelautan dan Perikanan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan program bidang kelautan dan perikanan;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kelautan dan perikanan;
- d. Pengawasan bidang Kelautan dan Perikanan;
- e. Perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pengendalian bidang kelautan dan perikanan;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kelautan dan perikanan;

- g. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan serta Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan;
- h. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas; dan
- i. Pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional.

B. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Sekretaris dalam menjalankan tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Sekretaris dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang perencanaan dan program;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang keuangan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang umum dan kepegawaian.

Sekretariat, membawahkan 3 (tiga) subbagian, yaitu subbagian Perencanaan dan Program; subbagian Keuangan; dan subbagian Umum Dan Kepegawaian.

C. Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan Pengembangan Usaha dan Pemberdayaan Kenelayanan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kenelayanan Serta Pengawasan Perlindungan Kenelayanan Pengendalian Sumber Daya Ikan.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Sarana dan Prasarana Kenelayanan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Pengawasan, Perlindungan Kenelayanan dan Sumber Daya Ikan;

Bidang Tangkap membawahi 2 (dua) seksi, yaitu Seksi Sarana dan Prasarana Kenelayanan dan Seksi Pengawasan, Perlindungan Kenelayanan dan Sumber Daya Ikan.

D. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas Menyiapkan perumusan kebijakan teknis, produksi dan usaha perikanan budidaya, pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya serta pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Produksi dan Pengembangan Pembudidaya Ikan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Pengelolaan Kesehatan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembudidaya Ikan.

Bidang Perikanan Budidaya membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu Seksi Produksi dan Pengembangan Pembudidaya Ikan, Seksi Pengelolaan Kesehatan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan, dan Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembudidaya Ikan;

E. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan

Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas Menyiapkan rumusan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Kawasan Perikanan, Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan serta Pengembangan dan Perijinan Usaha Perikanan.

Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Pengelolaan Kawasan Perikanan dan Perizinan Usaha Perikanan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan;

Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan membawahi 2 (dua) seksi, yaitu Seksi Pengelolaan Kawasan Perikanan dan Perizinan Usaha Perikanan dan Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan;

- F. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan
Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan mempunyai tugas Menyiapkan rumusan kebijakan teknis bidang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan, Pemasaran dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan serta Pengembangan Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan.

Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi:

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Pengembangan Sarana Prasarana Tempat Pelelangan Ikan;

Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan membawahi 2 (dua) seksi, yaitu Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Tempat Pelelangan Ikan;

- G. Kelompok jabatan fungsional
H. Unit Pelaksana Teknis Dinas

2.2. Sumber Daya Dinas Kelautan Dan Perikanan

Berdasarkan data bulan Desember tahun 2021, dalam melaksanakan kegiatan operasional Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pati didukung oleh sumber daya manusia sejumlah 48 personel, terdiri atas 32 orang laki-laki dan 16 perempuan. Secara rinci jumlah pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut berikut :

Jumlah PNS : 48 orang, terdiri dari :

1. Pejabat Struktural : 20 orang
2. Fungsional Umum : 28 orang

Jumlah PNS menurut golongan

1. Golongan I : - orang
2. Golongan II : 18 orang
3. Golongan III : 24 orang
4. Golongan IV : 6 orang

Jumlah PNS menurut tingkat pendidikan

1. SD : 0 orang
2. SLTP : 0 orang
3. SLTA : 20 orang
4. Sarjana Muda : 2 orang
5. Sarjana : 15 orang
6. Pasca Sarjana : 11 orang

Jumlah Penyuluh Perikanan PNS (Pegawai Pusat) 16 orang, jumlah PPB (Penyuluh Perikanan Bantu) Tenaga Kontrak Pusat 13 orang, jumlah tenaga kontrak dan harian lepas 145 orang terdiri dari 20 orang tenaga harian lepas kantor, 118 tenaga harian lepas TPI dan 7 orang tenaga harian lepas BBI dan Tambak Dinas.

Selain sumber daya manusia sejumlah aset pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kedinasan meliputi aset bergerak berupa kendaraan (roda empat dan roda dua), peralatan kantor (komputer, printer, LCD projector, lemari arsip, meja-kursi kantor, dll) dan aset tidak bergerak meliputi tanah, gedung perkantoran/bangunan. Deskripsi lengkap aset/modal fisik Dinas Kelautan sebagaimana tabel 2.1 dan tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.1
Aset Bergerak Dinas Kelautan dan Perikanan

| No | Nama Aset | Jumlah | Kondisi |
|----|--------------------|--------|---------|
| 1 | Mobil dinas | 12 | Baik |
| 2 | Sepeda motor dinas | 62 | Baik |
| 3 | Traktor | 4 | Baik |
| 4 | Genset | 9 | Baik |
| 5 | Pompa Air | 13 | Baik |
| 6 | Excavator/ Bego | 2 | Baik |
| 7 | Truck tangki air | 1 | Baik |
| 8 | Alat2 laboratorium | 33 | Baik |
| 9 | Mesin ketik manual | 4 | Baik |
| 10 | Almari | 90 | Baik |
| 11 | Meja | 219 | Baik |
| 12 | Kursi | 737 | Baik |
| 13 | Filling kabinet | 31 | Baik |
| 14 | Tabung pemadam | 7 | Baik |
| 15 | Timbangan | 12 | Baik |
| 16 | Lemari es | 5 | Baik |
| 17 | Freezer | 1 | Baik |
| 18 | Komputer/ PC | 36 | Baik |
| 19 | Laptop | 65 | Baik |
| 20 | Printer | 68 | Baik |
| 21 | AC | 34 | Baik |
| 22 | LCD proyektor | 9 | Baik |
| 23 | Kamera digital | 8 | Baik |
| 24 | Handycam | 3 | Baik |
| 25 | Wireless | 3 | Baik |
| 26 | Sound system | 7 | Baik |
| 27 | Televisi | 4 | Baik |

| | | | |
|----|---------------------|----|------|
| 28 | Mesin finger print | 12 | Baik |
| 29 | Mesin potong rumput | 2 | Baik |
| 30 | Rak Arsip | 8 | Baik |
| 31 | CCTV | 30 | Baik |
| 32 | Hand phone | 4 | Baik |
| 33 | TV | 9 | Baik |
| 34 | Pompa Pemadam | 1 | Baik |
| 35 | Thermometer | 15 | Baik |
| 36 | Penghancur Kertas | 2 | Baik |
| 37 | Sorong | 1 | Baik |

Tabel 2.2.
Aset Tidak Bergerak Dinas Kelautan dan Perikanan

| No | Nama Tanah/ Bangunan | Luas Tanah (m²) | Luas Bangunan (m²) | Ket |
|----|------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 1.479 | 817 | |
| 2 | TPI Juwana Unit I | 6.463 | 2.325 | |
| 3 | TPI Juwana Unit II | 40.000 | 3.680 | |
| 4 | TPI Banyutowo | 2.351 | 2.351 | |
| 5 | TPI Puncel | 420 | 214 | |
| 6 | TPI Sambiroto | 506 | 132 | |
| 7 | TPI Margomulyo | 271 | 84 | |
| 8 | TPI Pecangaan | 300 | 275 | |
| 9 | TPI Alasdowo | 120 | 72 | |
| 10 | BBI Brati | 14.180 | 639 | |
| 11 | BBI Sukolilo | 11.000 | 107,75 | |
| 12 | BBI Tlogowungu | 19.789 | 178 | |
| 13 | Tambak Dinas Margomulyo | 4.500 | 36 | Bangunan gudang |
| 14 | Tambak Dinas Dororejo | 4.100 | 81 | Bangunan Handling space |
| 15 | Laboratorium POSIKANDU | - | 54 | Berada di lahan tambak dinas Dororejo |

Potensi Bidang Kelautan dan Perikanan

- Luas Wilayah Kawasan Pesisir : 37.943 Ha
- Jumlah Kecamatan Kawasan Pesisir : 7 kec.
- Jumlah Desa Kawasan Pesisir : 136 desa
- Panjang Pantai : 60 km
- Luas Tambak Garam : 2.902 Ha
- Luas Lahan Budidaya Tambak : 10.558 Ha
- Luas Lahan Budidaya Kolam : 434,62 Ha
- Luas Potensi Mangrove : 8.906,35 Ha
- Luas Eksisting Mangrove : 230.97 Ha
- Terumbu Karang Buatan
 - Muara Sungai Juwana : 450 m²
 - Pantai Desa Lengkong : 450 m²
 - Muara Sungai Juwana : 450 m²
- Rumpon Pantai Banyutowo : 4.400 m²
- Kelompok Budidaya
- Kelompok Pembudidaya Garam
 - Jumlah Kelompok PUGAR : 976 kelompok
 - Jumlah Kecamatan : 4 kec.
 - Jumlah Desa : 20 desa
- Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB)
 - Berbadan Hukum : 130 KUB
 - KUB BH Kemenkumham : 5 KUB
 - KUB BH Notaris : 30 KUB
- Koperasi Nelayan Berbadan Hukum : 8

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan Dan Perikanan

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Kinerja pelayanan disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dapat lebih terarah baik dari segi administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat di pertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang sangat terbatas. Dengan demikian perencanaan yang di lakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan, maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan teknis serta penyusunan program dan kegiatan teknis dan strategis dalam pembangunan bidang kelautan dan perikanan;

2. Memberikan pelayanan umum, baik berupa pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun kepada instansi vertikal atau horizontal;
3. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi bidang kelautan dan perikanan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten, Provinsi, atau APBN.

Berdasarkan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati pencapaian target kinerja selama periode 2017 – 2022 dapat dijelaskan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022

| No. | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikat or lainnya | Target Renstra | | | | Realisasi Capaian | | | | Rasio Capaian | | | |
|-----|---|-------------|----------------|---------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | Tahun ke- | | | | pada Tahun ke- | | | |
| | | | | | 1 (2018) | 2 (2019) | 3 (2020) | 4 (2021) | 1 (2018) | 2 (2019) | 3 (2020) | 4 (2021) | 1 (2018) | 2 (2019) | 3 (2020) | 4 (2021) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| 1 | Pertumbuhan produktivitas komoditas unggulan di sektor perikanan | | 5,53% | | 2,53 | 3,31 | 3,49 | 4,08 | 27,51 | 85,47 | 3,09 | (1,93) | 10,87 | 25,82 | 0,89 | (0,47) |
| 2 | Produktivitas perikanan tangkap | | 13,54% | | 13,16 | 13,21 | 13,27 | 13,39 | 9,02 | 26,83 | 47,27 | 46,78 | 0,69 | 2,03 | 3,56 | 3,49 |
| 3 | Produktivitas perikanan budidaya | | 3,93% | | 3,90 | 3,9 | 3,91 | 3,92 | 4,02 | 16,04 | 16,11 | 16,19 | 1,03 | 4,11 | 4,12 | 4,13 |
| 4 | Produktivitas garam rakyat | | 114,3% | | 74,54 | 81,5 | 89,45 | 99,39 | 112,8 | 120,88 | 66,62 | 65,27 | 1,51 | 1,48 | 0,74 | 0,66 |
| 5 | Pertumbuhan angka konsumsi ikan | | 3,71% | | 4,45 | 3,51 | 3,49 | 3,47 | 2,18 | 3,55* | 0,31 | 4,08 | 0,49 | 1,01 | 0,09 | 1,18 |
| 6 | Pertumbuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan | | 0,60% | | 0,20 | 0,30 | 0,4 | 0,5 | 10,62 | 5,56 | 1,84 | (3,82) | 53,10 | 18,53 | 4,60 | (7,64) |
| 7 | Produksi garam | | 326.382,65 ton | | 212.858,25 | 232.725,02 | 255.429,90 | 283.811 | 320.228,58 | 350.761,32 | 193.307,04 | 98.211,68 | 1,50 | 1,51 | 0,76 | 0,35 |
| 8 | Prosentase penurunan kasus pelanggaran terhadap sumberdaya kelautan | | 8,33% | | 6,25 | 6,67 | 7,14 | 8,33 | 7,69 | 30,8 | (11,11) | (75) | 1,23 | 4,62 | (1,56) | (9,00) |
| 9 | Peningkatan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan | | 0,26% | | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,18 | 6,9 | 0,33 | 0,19 | 0,22 | 76,67 | 3,67 | 2,11 | 1,22 |
| 10 | Luasan eksisting lahan mangrove | | 199,98 Ha | | 176,88 | 180,43 | 185,77 | 192,11 | 184,74 | 225,39 | 247,801 | 230,97 | 1,04 | 1,25 | 1,33 | 1,20 |
| 11 | Pertumbuhan produksi garam | | 7% | | 7 | - | - | | 176,92 | - | | | 25,27 | - | - | - |

| No. | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikat or lainnya | Target Renstra | | | | Realisasi Capaian | | | | Rasio Capaian | | | |
|-----|--|-------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | Tahun ke- | | | | pada Tahun ke- | | | |
| | | | | | 1 (2018) | 2 (2019) | 3 (2020) | 4 (2021) | 1 (2018) | 2 (2019) | 3 (2020) | 4 (2021) | 1 (2018) | 2 (2019) | 3 (2020) | 4 (2021) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| 12 | produksi perikanan budidaya | | 42,775 ton | | 42.290 | 42.400 | 42.400 | 42.640 | 43.608,04 | 46.140,11 | 46.575,64 | 46.649,50 | 1,03 | 1,09 | 1,10 | 1,09 |
| | <i>udang windu</i> | | <i>780 ton</i> | | <i>755</i> | <i>760</i> | <i>760</i> | <i>775</i> | <i>811,64</i> | <i>778,30</i> | <i>782,19</i> | <i>786,10</i> | <i>1,08</i> | <i>1,02</i> | <i>1,03</i> | <i>1,01</i> |
| | <i>bandeng</i> | | <i>28,100 ton</i> | | <i>28.040</i> | <i>28.050</i> | <i>28.050</i> | <i>28.080</i> | <i>26.026,53</i> | <i>28.135,68</i> | <i>28.276,36</i> | <i>27.345,49</i> | <i>0,93</i> | <i>1,00</i> | <i>1,01</i> | <i>0,97</i> |
| | <i>nila salin</i> | | <i>710 ton</i> | | <i>550</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>665</i> | <i>3.356,64</i> | <i>3.928,29</i> | <i>3.947,93</i> | <i>4.884,30</i> | <i>6,10</i> | <i>6,55</i> | <i>6,58</i> | <i>7,34</i> |
| | <i>lele</i> | | <i>11,650 ton</i> | | <i>11,510</i> | <i>11.530</i> | <i>11.530</i> | <i>11.650</i> | <i>11.751,63</i> | <i>11.531,26</i> | <i>11.577,36</i> | <i>11.635,25</i> | <i>1,02</i> | <i>1,00</i> | <i>1,00</i> | <i>1,00</i> |
| | <i>ikan lain</i> | | <i>1,535 ton</i> | | <i>1.435</i> | <i>1.460</i> | <i>1.460</i> | <i>1.520</i> | <i>1.661,60</i> | <i>1.766,58</i> | <i>1.991,80</i> | <i>1.998,36</i> | <i>1,16</i> | <i>1,21</i> | <i>1,36</i> | <i>1,31</i> |
| 13 | Pertumbuhan KUB Nelayan aktif yang berbadan hukum kemenkumham | | 28,13% | | 23,08 | 25 | 25 | 28 | 30,77 | 47,06 | 28 | 6,25 | 1,33 | 1,88 | 1,12 | 0,22 |
| 14 | Volume ikan yang dilelang di TPI | | 29,228,22 ton | | 28.004,67 | 28.228,71 | 28.511 | 28.853,13 | 23.517 | 34.768,82 | 30.363,39 | 33.833,86 | 0,84 | 1,23 | 1,06 | 1,17 |
| 15 | Ketercapaian retribusi penjualan hasil produksi BBI dan tambak dinas | | 100% | | 100 | 100 | 100 | 100 | 101,09 | 106,55 | 100,2 | 100,09 | 1,01 | 1,07 | 1,00 | 1,00 |
| 16 | Persentase kelompok pelaku utama perikanan madya | | 7,18% | | 5,52 | 6,19 | 6,4 | 6,67 | 25,28 | 27,74 | 25,39 | 28,64 | 4,58 | 4,48 | 3,97 | 4,29 |
| 17 | Produksi olahan ikan | | 42,725,17 ton | | 41.881,24 | 42.090,64 | 42.301,10 | 42.512,60 | 115.448,40 | 126.444,60 | 83.364,66 | 19.723,47 | 2,76 | 3,00 | 1,97 | 0,46 |
| 18 | Pertumbuhan pelaku usaha yang berijin usaha kelautan dan perikanan | | 8,70% | | 6,80 | 7,2 | 7,5 | 8,3 | 33,33 | 25 | 20 | 0 | 4,90 | 3,47 | 2,67 | - |

Capaian kinerja selama pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan target yang telah ditetapkan sebagian besar sudah melampaui dari target yang telah ditetapkan.

Sektor Perikanan Laut sangat terpengaruh erat dengan berbagai perubahan kondisi alam yang kini terus menekan hasil tangkapan ikan di laut. Berbagai faktor seperti ketidakpastian cuaca, kondisi cuaca ekstrem, kenaikan suhu permukaan laut (sea surface temperature-SST), naik turunnya harga bahan bakar serta perubahan arah angin, menurunkan tingkat produktivitas nelayan. Perubahan iklim juga turut memengaruhi distribusi dan penyebaran ikan di laut, sementara kenaikan harga bahan bakar akan memengaruhi kesempatan nelayan untuk menangkap ikan seiring dengan pergeseran penyebaran ikan yang terus berubah akibat perubahan iklim. Regulasi yang berubah-ubah juga turut mengakibatkan sebagian besar nelayan di Kabupaten Pati tidak dapat melakukan kegiatan penangkapan.

Produksi perikanan budidaya di tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 pada dasarnya sudah memenuhi target tapi untuk komoditas ikan bandeng belum memenuhi target. hal itu dikarenakan pembudidaya ikan bandeng banyak yang beralih ke pembudidayaan ikan nila salin yang dinilai mempunyai produktivitas yang lebih tinggi dibanding dengan ikan bandeng.

Untuk indikator peningkatan angka konsumsi ikan di tahun 2018 dan tahun 2020 belum dapat memenuhi target dikarenakan ada perubahan cara perhitungan oleh Tim Perumus Angka Konsumsi Ikan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Walaupun peningkatan Angka Konsumsi Ikan belum memenuhi target tetapi Angka Konsumsi Ikan di Kabupaten Pati menempati urutan tertinggi di Jawa Tengah.

Indikator pertumbuhan produksi garam untuk tahun 2019 sudah tidak dipergunakan lagi karena di tahun 2019 program tersebut sudah dihapuskan dan dijadikan satu dengan program lainnya.

Ada beberapa faktor internal penyebab ketidaktercapaian target kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 antara lain adalah :

1. Keterbatasan SDM perangkat daerah baik kuantitas maupun kualitas.
2. Kualitas SDM pelaku usaha kelautan dan perikanan yang masih rendah.
3. Masih lemahnya koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka untuk sinergitas pelaksanaan kebijakan bidang kelautan dan perikanan.
4. Belum efektifnya perencanaan program dan kegiatan khususnya dalam menentukan indikator kinerja yang dapat menunjukkan fokus dan lokus (sasaran) secara lebih tepat.
5. Jumlah anggaran tiap tahun yang belum sebanding dengan beban tugas yang diemban oleh perangkat daerah.

Adapun faktor-faktor pendorong keberhasilan pencapaian target kinerja yang dilakukan Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Pati di tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 antara lain:

1. Adanya koordinasi yang baik antara aparaturnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dengan pelaku usaha kelautan dan perikanan.
2. Dinas Kelautan dan Perikanan memaksimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelatihan dan pembinaan kepada para pelaku usaha kelautan dan perikanan.
3. Adanya bantuan baik berupa dana maupun sarana dan prasarana kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan yang berasal dari APBD, APBD Provinsi maupun swasta.

Berikut Tabel 2.4 dan 2.5 secara lengkap yang menggambarkan perkembangan jumlah anggaran dan realisasi APBD Kabupaten Pati dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati

| No | Uraian (Program) | Anggaran pada Tahun ke - | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | |
|-----|---|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 1 (2018) | 2 (2019) | 3 (2020) | 4 (2021) | 1 (2018) | 2 (2019) | 3 (2020) | 4 (2021) |
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (11) | (12) |
| 1 | Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir | 75.000.000 | 300.000.000 | 416.387.000 | 507.366.000 | 75.000.000 | 85.000.000 | 407.833.000 | 125.000.000 |
| 2 | Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan | 25.000.000 | 150.000.000 | 166.387.000 | 182.366.000 | 25.000.000 | 50.000.000 | 32.719.000 | 17.485.000 |
| 3 | Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut | 50.000.000 | 150.264.000 | 170.950.000 | 196.972.000 | 50.000.000 | 155.000.000 | 63.724.000 | 20.000.000 |
| 4 | Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut | 147.000.000 | 460.398.000 | 506.427.000 | 545.458.000 | 157.000.000 | 225.000.000 | 164.156.000 | 132.923.000 |
| 5 | Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat | 45.000.000 | 0 | 0 | 0 | 195.000.000 | 0 | 0 | 0 |

| No | Uraian (Program) | Anggaran pada Tahun ke - | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | |
|-----|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| | | 1 (2018) | 2 (2019) | 3 (2020) | 4 (2021) | 1 (2018) | 2 (2019) | 3 (2020) | 4 (2021) |
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (11) | (12) |
| 6 | Pengembangan Budidaya Perikanan | 731.500.000 | 2.500.000.000 | 2.773.124.000 | 3.039.447.000 | 946.095.000 | 1.030.519.000 | 1.203.602.000 | 937.089.000 |
| 7 | Pengembangan Perikanan Tangkap | 3.996.500.000 | 14.300.000.000 | 20.000.000.000 | 21.920.742.000 | 6.391.570.000 | 8.099.542.000 | 10.005.410.000 | 8.444.457.600 |
| 8 | Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan | 50.000.000 | 300.000.000 | 332.775.000 | 364.734.000 | 50.000.000 | 155.000.000 | 76.372.000 | 28.222.000 |
| 9 | Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan | 97.000.000 | 2.350.000.000 | 2.523.124.000 | 2.714.447.000 | 312.000.000 | 200.000.000 | 195.412.000 | 161.862.500 |
| 10 | Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar | 225.000.000 | 2.400.000.000 | 2.662.199.000 | 2.917.869.000 | 1.658.255.000 | 1.378.410.000 | 536.114.000 | 1.466.505.250 |

Tabel 2.5
Pertumbuhan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati

| No, | Uraian (Program) | Anggaran pada Tahun ke- | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|-----|---|-------------------------|--------|--------|-----------------------------------|--------|--------|-----------------------|-----------|
| | | (2019) | (2020) | (2021) | (2019) | (2020) | (2021) | Anggaran | Realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (6) | (7) | (8) | (10) | (11) | (12) |
| 1 | Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir | 4,00 | 1,39 | 1,22 | 1,13 | 4,80 | 0,31 | 2,20 | 2,08 |
| 2 | Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan | 6,00 | 1,11 | 1,10 | 2,00 | 0,65 | 0,53 | 2,74 | 1,06 |
| 3 | Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut | 3,01 | 1,14 | 1,15 | 3,10 | 0,41 | 0,31 | 1,77 | 1,27 |
| 4 | Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut | 3,13 | 1,10 | 1,08 | 1,43 | 0,73 | 0,81 | 1,77 | 0,99 |
| 5 | Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Pengembangan Budidaya Perikanan | 3,42 | 1,11 | 1,10 | 1,09 | 1,17 | 0,78 | 1,87 | 1,01 |
| 7 | Pengembangan Perikanan Tangkap | 3,58 | 1,40 | 1,10 | 1,27 | 1,24 | 0,84 | 2,02 | 1,12 |
| 8 | Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan | 6,00 | 1,11 | 1,10 | 3,10 | 0,49 | 0,37 | 2,74 | 1,32 |
| 9 | Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan | 24,23 | 1,07 | 1,08 | 0,64 | 0,98 | 0,83 | 8,79 | 0,82 |
| 10 | Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar | 10,67 | 1,11 | 1,10 | 0,83 | 0,39 | 2,74 | 4,29 | 1,32 |

Dari tabel 2.4 dan tabel 2.5 tampak ada 1 (satu) program yang hanya terlaksana sekali di tahun awal renstra hingga akhir tahun pelaksanaan Renstra, Program tersebut adalah Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut dan Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut. Untuk tahun kedua dan seterusnya tidak dapat terlaksana karena program ini digabung menjadi kegiatan di program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. Dari tabel tersebut pula dapat terlihat bahwa pada tahun 2020 dan 2021 realisasi anggaran menunjukkan pertumbuhan yang relatif menurun. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati antara lain:

1. Keterbatasan APBD sehingga lebih diutamakan program yang prioritas.
2. Adanya Pandemi covid-19 sehingga membatasi perjalanan dinas ke luar daerah dan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan banyak orang seperti rapat-rapat dan pembinaan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan tugas dan fungsi utamanya kurun waktu lima tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPD, Berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati,

1. Tantangan

Tantangan adalah hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah, Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan adalah :

- a) Rendahnya minat masyarakat terhadap ikan segar dan produk olahannya;
- b) Harga jual hasil perikanan tangkap di luar Kabupaten Pati lebih tinggi;
- c) Sarana dan Prasarana pendaratan ikan di luar Kabupaten Pati lebih memadai;
- d) Tingginya tekanan terhadap sumberdaya alam kelautan dan perikanan, terutama pencemaran yang bermuara ke laut dan fenomena overfishing;
- e) Degradasi lingkungan (mangrove, terumbu karang) dan penurunan mutu perairan;
- f) Minimnya akses permodalan bagi usaha kelautan dan perikanan;
- g) Tidak seimbangny luas dan jangkauan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan sarana prasarana serta personel pengawas;

- h) Tingginya harga pakan ikan dan banyaknya dokumen kapal perikanan;
- i) Terbatasnya ketersediaan infrastruktur sektor kelautan dan perikanan, seperti infrastuktur tempat pendaratan ikan, pabrik pakan, gudang garam, jalan produksi, Tempat Pembenihan Ikan;
- j) Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang perikanan masih kurang.

2. Peluang

Beberapa peluang yang dapat diambil dalam upaya pengembangan sektor Kelautan dan Perikanan antara lain :

- a. Pembangunan Gudang Garam Nasional Kabupaten Pati yang berlokasi di Desa Raci Kecamatan Batangan dan Desa Sambilawang Kecamatan Trangkil oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. Kelembagaan nelayan, pembudidaya, petambak garam, pengolah dan pemasar mulai berkembang;
- c. Meningkatnya peran masyarakat dalam pengawasan sumber daya perikanan;
- d. Ditetapkannya kampung nila salin di Kecamatan Tayu berdasarkan ;
- e. Pembangunan pabrik garam industry di Desa Raci Kecamatan Batangan;
- f. Maraknya pembangunan cold storage di Kecamatan Juwana dan Wedarijaksa;
- g. Dukungan permodalan oleh pemerintah, swasta dan perbankan dengan bentuk kredit murah dan pola kemitraan.

Berdasarkan analisis di atas, secara garis besar jenis layanan yang diselenggarakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dalam kurun waktu tahun 2023-2026 yaitu:

- 1. Pembinaan dan pelatihan ketrampilan masyarakat kelautan dan perikanan;
- 2. Pendampingan dan fasilitasi usaha bidang kelautan dan perikanan;
- 3. Peningkatan kualitas kelembagaan kelompok-kelompok kelautan dan perikanan;
- 4. Sosialisasi regulasi tentang kelautan dan perikanan;
- 5. Pengelolaan sarana dan prasarana pendukung usaha bidang kelautan dan perikanan;
- 6. Peningkatan kualitas pelayanan jasa unit pelaksana tugas Dinas Kelautan dan Perikanan baik itu Tempat Pelelangan Ikan maupun Balai Benih dan Budidaya Ikan Kabupaten Pati;
- 7. Pemberian rekomendasi ijin usaha bidang kelautan dan perikanan;
- 8. Kerjasama lintas sektor pelaksanaan patroli dalam rangka pengamanan sumberdaya kelautan,

Untuk mendukung jenis layanan yang diselenggarakan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kurun waktu tahun 2023-2026, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan untuk tahun pertama sebesar Rp. 14.488.177.000,00, tahun ke 2 Rp. 14.899.593,00, tahun ke 3 Rp. 15.126.752.000,00, tahun ke 4 Rp. 15.389.257,00 sehingga dalam kurun waktu empat tahun dana yang dibutuhkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebesar Rp. 59.903.779.000,00 dengan Alokasi pendanaan 63,90% untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten (EKS BAU), dan 36,10% untuk program urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan lainnya.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati merupakan salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati yang tugas dan fungsinya merupakan pelaksana tugas di bidang kelautan dan perikanan serta pengambil kebijakan dalam pembangunan bidang kelautan dan perikanan. Kebijakan dan strategi yang di ambil di sektor perikanan ditujukan untuk meningkatkan produksi perikanan dan mutu serta kualitas hasil perikanan baik dalam bentuk ikan segar maupun ikan olahan. Oleh karena itu, guna mengidentifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, maka dapat dijelaskan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya seperti dirumuskan pada Table 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Rendahnya produksi perikanan baik tangkap maupun budidaya | Rendahnya produktivitas perikanan tangkap | Belum optimalnya layanan sarana prasarana nelayan perikanan tangkap |
| | | | Perlindungan terhadap nelayan kecil belum optimal |
| | | | Masih lemahnya pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap |
| | | Belum optimalnya produktivitas perikanan budidaya | Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana perikanan budidaya |
| | | | Masih lemahnya kelembagaan pembudidaya ikan |
| | | | Belum optimalnya layanan kesehatan lingkungan budidaya |

Masalah pokok dari pembangunan daerah khususnya sektor kelautan dan perikanan adalah rendahnya produksi perikanan baik produksi perikanan tangkap maupun produksi perikanan budidaya. Kabupaten Pati memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang begitu besar dengan garis pantai sepanjang \pm 60Km dan Tambak seluas \pm 10.329 Ha, yang terdapat di sepanjang pesisir serta sumberdaya perikanan air tawar yang semakin

berkembang. Namun demikian, potensi yang dimiliki tidak sebanding dengan apa yang didapatkan, produktivitas dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya masih belum optimal.

Akar masalah dari rendahnya produktivitas perikanan tangkap diantaranya adalah Belum optimalnya layanan sarana prasarana nelayan perikanan tangkap, Perlindungan terhadap nelayan kecil belum optimal dan Masih lemahnya pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap.

Sedangkan yang menjadi akar masalah dari belum optimalnya produktivitas perikanan budidaya diantaranya adalah Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana perikanan budidaya, Masih lemahnya kelembagaan pembudidaya ikan dan Belum optimalnya layanan Kesehatan lingkungan budidaya.

3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Daerah dalam RPD Tahun 2023 – 2026

Dalam RPD telah dirumuskan ada 4 (empat) isu strategis yang diangkat yaitu:

1. Pertumbuhan Ekonomi berkualitas dengan menekankan pada pemerataan didukung penguatan infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
2. Penurunan Kemiskinan dengan fokus peningkatan akses layanan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin;
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan menekankan Peningkatan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial Ekonomi Masyarakat;
4. Tata kelola pemerintahan dengan menekankan kepada Penguatan Fungsi Birokrasi dan Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik.

Dengan memperhatikan isu strategis selanjutnya kondisi akhir yang hendak dicapai. Kondisi yang akan dicapai tersebut dalam bentuk tujuan dan sasaran pembangunan. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pati menetapkan tujuan yang merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2023-2026 yaitu sebagai berikut:

1. Menguatnya pertumbuhan ekonomi berkualitas, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu:
 - 1.1 Meningkatnya kondusivitas wilayah
 - 1.2 Meningkatnya Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian (dalam arti luas)
 - 1.3 Meningkatnya Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan
 - 1.4 Meningkatnya Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan
 - 1.5 Menguatnya infrastruktur wilayah
 - 1.6 Meningkatnya kinerja Sektor Pariwisata
 - 1.7 Menurunnya Ketimpangan Pendapatan
 - 1.8 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

2. Meningkatnya kesempatan kerja lokal, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu:
 - 2.1 Meningkatnya Elastisitas Kesempatan Kerja
 - 2.2 Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja
3. Menurunnya tingkat kemiskinan, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu:
 - 3.1 Meningkatnya Akses Pelayanan Dasar
 - 3.2 Meningkatnya standar hidup masyarakat
4. Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas serta pemerataan akses pendidikan, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu:
 - 4.1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
 - 4.2 Meningkatnya kualitas dan pemerataan akses pendidikan
5. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu Meningkatnya kesetaraan kualitas hidup penduduk laki-laki dan perempuan
6. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu:
 - 6.1 Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten
 - 6.2 Meningkatnya Kemandirian fiskal daerah

Terkait dengan tugas dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati mendukung Tujuan dan Sasaran RPD yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2023-2026 sebagai berikut :

1. Menguatnya pertumbuhan ekonomi berkualitas, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu:
 - 1.1 Meningkatnya Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian (dalam arti luas). Dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan mendukung dengan pelaksanaan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, dan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
 - 1.2 Menurunnya Ketimpangan Kesejahteraan Masyarakat. Dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan mendukung dengan pelaksanaan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
2. Meningkatnya kesempatan kerja lokal, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu:
 - 2.1 Meningkatnya Penyerapan Kesempatan Kerja. Dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan mendukung dengan pelaksanaan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.
 - 2.2 Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja. Dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan mendukung dengan pelaksanaan Program

Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, dan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

- 3. Menurunnya tingkat kemiskinan, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu:
 - 3.1 Meningkatnya standar hidup masyarakat. Meningkatnya Penyerapan Kesempatan Kerja. Dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan mendukung dengan pelaksanaan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.
- 4. Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas serta pemerataan akses pendidikan, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu:
 - 4.1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan mendukung dengan pelaksanaan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, dan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dipaparkan pada Tabel 3.1. di atas, dan dikaitkan dengan telaah Tujuan dan Sasaran Daerah dalam RPD 2023-2026 selanjutnya diidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran daerah tersebut. Berikut faktor pendukung dan penghambat tersebut:

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Terhadap Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati

| No | Tujuan dan Sasaran RPD | Permasalahan Pelayanan PD | Faktor | |
|----|---|--|--|---|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Menguatnya pertumbuhan ekonomi berkualitas, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu: 1.1 Meningkatnya Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian (dalam arti luas) 1.2 Menurunnya Ketimpangan Kesejahteraan Masyarakat | Menurunnya daya dukung dan kerusakan ekosistem pesisir (abrasi, mangrove dan terumbu karang) | Faktor alam dan manusia yang merusak sumberdaya perikanan | Terbentuknya Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas) yang mengawasi pelanggaran sumberdaya perikanan dan penanaman mangrove oleh pemerintah dan swadaya masyarakat |
| | | Masih rendahnya pendapatan nelayan, pembudidaya, dan pengolah dibanding dengan profesi lainnya | Biaya produksi (perbekalan, pakan, bahan baku, dll) terbilang tinggi | Bantuan kredit lunak untuk pelaku usaha perikanan |

| No | Tujuan dan Sasaran RPD | Permasalahan Pelayanan PD | Faktor | |
|----|--|--|---|--|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| | Meningkatnya kesempatan kerja lokal, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu: 2.1 Meningkatnya Penyerapan Kesempatan Kerja. 2.2 Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja | Rendahnya minat pencari kerja untuk menjadi nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan | Tingginya resiko yang harus ditanggung pelaku usaha perikanan baik itu resiko keselamatan maupun kerugian | Sumberdaya ikan yang melimpah di lautan lepas |
| | Menurunnya tingkat kemiskinan, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu: 3.2 Meningkatnya standar hidup masyarakat | Kesejahteraan nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan masih rendah | Belum optimalnya jaminan perlindungan nelayan dan pembudidaya | Bantuan permodalan bagi pelaku usaha perikanan, asuransi untuk nelayan dan pembudidaya |
| | Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas serta pemerataan akses pendidikan, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu: 4.1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Rendahnya konsumsi makan ikan di masyarakat dan standar mutu olahan ikan yang masih rendah | Produk olahan ikan kurang beragam dan kesadaran pendaftaran sertifikasi keamanan pangan rendah | Banyaknya pelaku usaha pengolahan ikan yang berminat untuk mendapatkan pelatihan diversifikasi olahan ikan, pendampingan pengurusan sertifikasi keamanan olahan ikan serta adanya gerakan memasyarakatkan gemar makan ikan (GEMARIKAN) |

3.4. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

A. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. RPJMN 2020–2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional(RPJPN) 2005- 2025 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju.

Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan dalam sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

- 1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- 3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- 6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh bangsa;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Presiden menetapkan lima arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia 2045 yang meliputi pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penye-derhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Kelima arahan utama Presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024, yang terdiri atas:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan kemananan, dan transformasi pelayanan publik.

Presiden juga memberikan dua arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk:

1. membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil kelautan dan perikanan, dan petambak garam, serta para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan; dan
2. memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi KKP tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”;
2. “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”;
3. “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”; dan
4. “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”.

Tujuan

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan, meliputi:

1. “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”, dengan tujuan:
 - a. meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan; dan
 - b. menguatnya inovasi dan riset kelautan dan perikanan.
2. “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”, dengan tujuan:
 - a. optimasi pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
 - b. meningkatnya mutu, daya saing, dan penguatan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan;
 - c. meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - d. meningkatnya sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
 - e. optimalnya pengelolaan ruang laut.
3. “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”, dengan tujuan optimalnya konservasi dan pengelolaan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil.
4. “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”, dengan tujuan meningkatnya kinerja Reformasi Birokrasi KKP.

Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) KKP tahun 2020-2024, terdiri dari:

- SS-1 Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat;
- SS-2 Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat;
- SS-3 Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan;
- SS-4 Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat;
- SS-5 Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan;
- SS-6 Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab;
- SS-7 Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing;
- SS-8 Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif;
- SS-9 Tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah “Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat”, dengan Indikator Kinerja, yaitu Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP) dari 59,16 pada tahun 2020 menjadi 63,87 pada tahun 2024.

Sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah “Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat”, dengan indikator kinerja:

- 1) pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan dari 7,9% pada tahun 2020 menjadi 8,71% pada tahun 2024;
- 2) nilai ekspor hasil perikanan, dari USD 6,17 miliar pada tahun 2020 menjadi USD 8,00 miliar pada tahun 2024; dan
- 3) konsumsi ikan, dari 56,39 kg/kapita/tahun pada tahun 2020 menjadi 62,05 kg/kapita/tahun pada tahun 2024.

Sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah “Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan”, dengan indikator kinerja:

- 1) proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman dari $\leq 64\%$ pada tahun 2020 menjadi $\leq 80\%$ pada tahun 2024; dan
- 2) luas kawasan konservasi perairan, dari 23,40 juta ha pada tahun 2020 menjadi 26,90 juta ha pada tahun 2024.

Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah “Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat”, dengan indikator kinerja:

- 1) persentase serapan lulusan pendidikan dan pelatihan pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), dari 60 % pada tahun 2020 menjadi 75 % pada tahun 2024; dan
- 2) kelompok pelaku utama/usaha yang ditingkatkan kelasnya, setiap tahun minimal sebanyak 1.500 kelompok per tahun selama tahun 2020-2024.

Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah “Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan”, dengan indikator kinerja, yaitu hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan, dari 5 (lima) hasil riset pada tahun 2020 menjadi 15 (lima belas) hasil riset pada tahun 2024.

Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah “Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab”, dengan indikator kinerja:

- 1) WPPNRI yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola, dari tiga WPPNRI pada tahun 2020 menjadi sebelas WPPNRI pada tahun 2024;
- 2) penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir, dari 24 Rencana Zonasi pada tahun 2020 menjadi dua belas Rencana Zonasi pada tahun 2024 (102 kumulatif Rencana Zonasi tahun 2020-2024); dan
- 3) persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan, dari 94% pada tahun 2020 menjadi 98% pada tahun 2024.

Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yang akan dicapai adalah “Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing”, dengan indikator kinerja:

- 1) produksi perikanan, dari 26,46 juta ton (produksi ikan 15,47 juta ton dan rumput laut 10,99 juta ton) pada tahun 2020 menjadi 32,75 juta ton (produksi ikan 20,42 juta ton dan rumput laut 12,33 juta ton) pada tahun 2024;
- 2) produksi garam nasional, dari 3 juta ton pada tahun 2020 menjadi 3,4 juta ton pada tahun 2024;
- 3) dana yang disalurkan untuk pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil, dari Rp2,8 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp4,2 triliun pada tahun 2024;
- 4) kawasan kluster sentra produksi perikanan budidaya unggulan, dari lima kawasan pada tahun 2020 menjadi lima puluh kawasan pada tahun 2024.

Sasaran strategis kedelapan (SS-8) yang akan dicapai adalah “Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif”, dengan indikator kinerja:

- 1) persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing, dari 54% pada tahun 2020 menjadi 75% pada tahun 2024;
- 2) persentase penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan 93% dari tahun 2020 hingga tahun 2024; dan
- 3) tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan dari 77% pada tahun 2020 menjadi 82% pada tahun 2024.

Learning and Growth Perspective (input) Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome KKP melalui Sasaran strategis kesembilan (SS-9) “Tatakelola pemerintahan yang baik” dengan indikator kinerja:

- 1) nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP dari 71 pada tahun 2020 menjadi 75 pada tahun 2024; dan
- 2) nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari 88 pada tahun 2020 menjadi 90 pada tahun 2024.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 memiliki kontribusi yang cukup besar dalam mendukung

pencapaian indikator dalam Matriks Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 dengan menjabarkan tujuan yang akan dicapai yaitu :

1. “Meningkatnya Konsumsi Makan Ikan” dengan indikator Pertumbuhan Angka Konsumsi Ikan. Tujuan ini sesuai dengan penjabaran sasaran strategis KKP yang kedua yaitu “Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat” dengan indikator konsumsi ikan Masyarakat.
2. “Meningkatnya Produksi Perikanan” dengan indikator Pertumbuhan produksi perikanan. Tujuan ini sesuai dengan penjabaran sasaran strategis KKP yang ketujuh yaitu “Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing” dengan indikator produksi perikanan.

Capaian kinerja Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 yang dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati nantinya akan saling mendukung keseluruhan tercapainya sasaran Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

B. Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

Tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

Tujuan jangka menengah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan Pelayanan : “Meningkatnya Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan Sub Sektor Perikanan” dengan indikator tujuan Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sub sektor perikanan (%).
2. Berkaitan dengan kesekretariatan : “Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan” dengan indikator tujuan Nilai Kepuasan Masyarakat (angka).

Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan Yang Partisipatif, Bertanggungjawab dan Berkelanjutan, indikator sasaran: produksi perikanan (ton/tahun), tingkat konsumsi ikan (kg/kap/tahun) dan produksi garam (ton/tahun), Nilai Tukar Nelayan (NTN), Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi);
2. Terwujudnya Kedaulatan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan indikator sasaran: Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku di sektor perikanan (%);
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah indikator sasaran: Nilai Kepuasan Masyarakat Dinas Kelautan dan Perikanan (Angka)

4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah indikator sasaran: Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan (Angka)

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 memiliki kontribusi yang cukup besar dalam mendukung pencapaian indikator dalam Matriks Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Hal ini dapat dilihat pada sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 yaitu: Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan Yang Partisipatif, Bertanggungjawab dan Berkelanjutan dengan indikator sasaran: produksi perikanan (ton/tahun), tingkat konsumsi ikan (kg/kap/tahun) dan produksi garam (ton/tahun), Nilai Tukar Nelayan (NTN), Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi).

Dari telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, dijabarkan faktor-faktor penghambat maupun pendorong dari pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati seperti tertuang dalam tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Ditinjau Dari Sasaran
Jangka Menengah Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan
Serta Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

| No | Indikator Sasaran Strategis Renstra K/L dan Dinas Provinsi | Permasalahan Pelayanan PD | Faktor | |
|----|---|---|--|--|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Indikator Sasaran Renstra KKP | | | |
| 1. | konsumsi ikan, dari 56,39 kg/kapita/tahun pada tahun 2020 menjadi 62,05 kg/kapita/tahun pada tahun 2024. Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat; | Tingkat konsumsi makan ikan Kabupaten Pati terbilang rendah dilihat dari skala nasional | Masih kurangnya minat masyarakat mengkonsumsi ikan | Adanya diversifikasi berbagai olahan ikan |
| 2. | kelompok pelaku utama/usaha yang ditingkatkan kelasnya, setiap tahun minimal sebanyak 1.500 kelompok per tahun selama tahun 2020-2024; | Masih banyak kelompok perikanan yang harus ditingkatkan kelasnya | Jumlah SDM ASN bidang perikanan hanya sedikit | Pembinaan penyuluh perikanan swadaya yang berasal dari masyarakat |
| 3. | persentase penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan 93% dari tahun 2020 hingga tahun 2024; | Masih banyaknya pelanggaran terhadap pelestarian ekosistem perikanan | Tidak adanya kewenangan untuk menindak para pelanggar | Terbentuknya Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas) yang melibatkan masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi sumberdaya perikanan |
| 4. | produksi perikanan, dari 26,46 juta ton (produksi ikan 15,47 juta ton dan rumput laut 10,99 juta ton) pada tahun 2020 menjadi 32,75 juta ton (produksi ikan 20,42 juta ton dan rumput laut 12,33 juta ton) pada tahun 2024; | Masih belum optimalnya produksi perikanan | Faktor cuaca dan alam yang tidak bisa diprediksi paling mendominasi dalam sektor perikanan | Tersedianya potensi pengembangan perikanan (Panjang pantai, luas lahan budidaya) dan penyediaan sarpras penangkapan dan pembudidayaan ikan |

| No | Indikator Sasaran Strategis Renstra K/L dan Dinas Provinsi | Permasalahan Pelayanan PD | Faktor | |
|----|--|---|---|--|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. | produksi garam nasional, dari 3 juta ton pada tahun 2020 menjadi 3,4 juta ton pada tahun 2024; | Produksi garam belum optimal | Kebijakan impor garam oleh pemerintah | Dibangunnya Gudang garam dan koperasi garam untuk mengontrol harga garam di Kabupaten Pati |
| | Indikator Sasaran Renstra DKP Prov. Jateng | | | |
| 6. | produksi perikanan (ton/tahun), tingkat konsumsi ikan (kg/kap/tahun) dan produksi garam (ton/tahun), Nilai Tukar Nelayan (NTN), Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi) | Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya belum optimal | Tingginya resiko yang harus ditanggung pelaku usaha perikanan baik itu resiko keselamatan maupun kerugian | Bantuan permodalan bagi pelaku usaha perikanan, asuransi untuk nelayan dan pembudidaya |

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penyusunan RPD Tahun 2023-2026 berpedoman pada tujuan RTRW Kabupaten Pati 2011-2031, yaitu terwujudnya Kabupaten Pati sebagai Bumi Mina Tani, berbasis keunggulan pertanian dan industri yang berkelanjutan. Pengaturan tata ruang sesuai peruntukan menjadi tantangan yang harus dihadapi untuk meminimalisir terjadinya krisis tata ruang. Penataan ruang yang baik perlu memperhatikan keterhubungan antara perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. Tujuan tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan perencanaan ruang wilayah, yaitu:

1. Strategi pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhierarki, meliputi:
 - a. membagi ruang wilayah pembangunan Daerah sesuai dengan perkembangan wilayah;
 - b. mengembangkan pusat pelayanan yang mampu menjadi simpul distribusi dan pemasaran; dan
 - c. mengembangkan sistem interaksi antar ruang wilayah untuk meningkatkan intensitas kegiatan perekonomian daerah.
2. Strategi pengembangan prasarana wilayah yang mampu mendorong pertumbuhan wilayah dan distribusi produk ekonomi lokal, meliputi:
 - a. mengembangkan sistem jaringan transportasi yang menjangkau seluruh wilayah Daerah;
 - b. mengembangkan prasarana energi yang mampu melayani seluruh wilayah Daerah;
 - c. mengembangkan prasarana telekomunikasi yang berkualitas dan menjangkau seluruh wilayah Daerah;
 - d. mengembangkan prasarana sumberdaya air yang mampu memenuhi kebutuhan air baku dan irigasi; dan
 - e. mengembangkan sistem jaringan prasarana lainnya.
3. Strategi pelestarian kawasan lindung, meliputi:
 - a. meningkatkan kualitas perlindungan kawasan lindung;
 - b. menegaskan lokasi kawasan resapan air dan dapat digunakan sebagai kawasan budidaya yang dapat mempertahankan fungsi resapan air;
 - c. memberikan fungsi perlindungan terhadap keanekaragaman hayati yang dilindungi;
 - d. membatasi dan memindahkan secara bertahap permukiman dan kegiatan budidaya lainnya di kawasan rawan bencana longsor; dan
 - e. mengembangkan ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan dengan proporsi 20% (dua puluh persen) ruang terbuka hijau publik dan 10% (sepuluh persen) ruang terbuka hijau privat.
4. Strategi pengembangan kawasan pertanian dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional, meliputi:
 - a. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. meningkatkan jaringan irigasi dan prasarana pendukung kegiatan pertanian; dan
 - c. mengembangkan pemasaran komoditas hasil pertanian.

5. Strategi pengembangan kawasan pesisir, meliputi:
 - a. menetapkan kawasan pengembangan budidaya perikanan tambak;
 - b. melakukan perlindungan dan penanaman kawasan hutan mangrove pada lahan-lahan tepi pantai untuk melestarikan kelangsungan tambak, pantai, habitat perikanan, pelindung abrasi, perlindungan keanekaragaman hayati, dan wisata alam; dan
 - c. mengembangkan pemasaran komoditas perikanan dan industrialisasi perikanan.
6. Strategi pemanfaatan potensi pertambangan yang inklusif dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan, meliputi:
 - a. menertibkan kegiatan pertambangan tanpa izin;
 - b. mengendalikan produksi pertambangan dalam rangka konservasi;
 - c. menerapkan dan meningkatkan recovery pertambangan;
 - d. menerapkan pemanfaatan kegiatan pertambangan yang memberikan kontribusi sosial, ekonomi, dan kelembagaan masyarakat serta meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar lokasi kegiatan pertambangan; dan
 - e. mengelola kegiatan pertambangan dengan mengembangkan kerjasama dan koordinasi yang efektif dengan pemerintah provinsi dan pusat dalam menerapkan kegiatan pertambangan berkelanjutan dan menjaga kualitas lingkungan hidup.
7. Strategi pengembangan kawasan peruntukan industri dan pengaturan kegiatan industri yang berada diluar kawasan peruntukan industri, meliputi:
 - a. menyediakan lokasi kawasan peruntukan industri;
 - b. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung industri termasuk sarana prasarana pengelolaan limbah dan air baku yang berkelanjutan;
 - c. mengendalikan perkembangan industri di luar kawasan peruntukan industri;
 - d. mengembangkan dan memberdayakan industri kecil dan/atau rumah tangga;
 - e. mengatur kegiatan industri pada masing-masing kawasan peruntukan industri dengan pendekatan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - f. menerapkan sistem produksi bersih pada proses produksi industri.
8. Strategi pengembangan kawasan permukiman, meliputi:
 - a. menyediakan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan; dan
 - b. mengembangkan prasarana, sarana dan utilitas permukiman.
9. Strategi pengembangan kawasan strategis
 - a. mengembangkan kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. mengembangkan kawasan pertanian (agropolitan).

Sementara itu, rencana struktur ruang Kabupaten Pati terdiri atas:

1. Rencana pengembangan sistem perkotaan yang terdiri atas:

- a. Enam satuan wilayah pembangunan (SWP) dengan pusat pengembangan di kawasan perkotaan Pati, Tayu, Juwana, dan Kayen, serta Ibukota Kecamatan Trangkil dan Jakenan;
 - b. PKL yang berada di kawasan perkotaan Pati, Juwana, dan Tayu, serta ibukota Kecamatan Kayen diusulkan menjadi PKL;
 - c. Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten meliputi PPK di ibukota Kecamatan Batangan, Dukuhseti, Gabus, Gembong, Jaken, Jakenan, Kayen, Margoyoso, Pucakwangi, Tambakromo, Trangkil, dan Winong, serta PPL di kawasan Desa Plaosan, Ngablak, Puncel, Karaban, Gunungwungkal, Ronggo, Margorejo, Sokopuluhan, Sukolilo, Prawoto, Maitan, Tlogorejo, Lahar, Wedarijaksa, dan Danyangmulyo.
2. Rencana sistem jaringan prasarana yang terdiri dari:
- a. Sistem jaringan transportasi;
 - b. Sistem jaringan energi;
 - c. Sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. Sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. Sistem jaringan prasarana lainnya.

Rencana pola ruang Kabupaten Pati terdiri atas:

1. Kawasan lindung, yang meliputi:
 - a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya terdiri atas:
 - 1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dengan luas 1.180,97 (seribu seratus delapan puluh koma sembilan puluh tujuh) hektar meliputi Kecamatan Cluwak, Gembong, Gunungwungkal dan Tlogowungu.
 - 2) Kawasan resapan air dengan luas kurang lebih 2.256 (dua ribu dua ratus lima puluh enam) hektar meliputi Kecamatan Cluwak, Gembong, Gunungwungkal, Kayen, Margoyoso, Sukolilo, dan Tlogowungu.
 - b. Kawasan perlindungan setempat terdiri atas sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar waduk.
 - c. Kawasan lindung geologi meliputi:
 - 1) Kawasan cagar alam geologi berupa Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo seluas kurang lebih 6.906 (enam ribu sembilan ratus enam) hektar meliputi Kecamatan Kayen, Kecamatan Sukolilo, dan Kecamatan Tambakromo.
 - 2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa sempadan mata air seluas kurang lebih 56 (lima puluh enam) hektar meliputi Sumber Air Sidomulyo/Klecung, Mburan, Gayam, Goboyo Ronggoboyo, Sonean/Bak Buntu, Sumber Kali Gede, Sumber Ringin, Mata Air Santi, Sumber Tambar, dan mata air lainnya.
2. Kawasan budidaya, yang meliputi:
 - a. Kawasan hutan produksi terdiri atas:
 - 1) Kawasan hutan produksi terbatas dengan luas 1.856,83 (seribu delapan ratus lima puluh enam koma delapan puluh tiga) hektar

- tersebar di Kecamatan Cluwak, Gembong, Gunungwungkal, Kayen, Margorejo, Sukolilo, dan Tlogowungu.
- 2) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 19.136,35 (sembilan belas ribu seratus tiga puluh enam koma tiga puluh lima) hektar yang tersebar di wilayah Kecamatan Cluwak, Dukuhseti, Gembong, Gunungwungkal, Jaken, Kayen, Margorejo, Pucakwangi, Sukolilo, Tambakromo, Tayu, Tlogowungu, Trangkil, Wedarijaksa, dan Winong.
 - 3) Kawasan peruntukan industri yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi tetap selanjutnya disebut kawasan hutan produksi tetap/kawasan peruntukan industri seluas kurang lebih 44 (empat puluh empat) hektar di Kecamatan Tambakromo.
- b. Kawasan pertanian terdiri atas:
- 1) Kawasan tanaman pangan dengan luas kurang lebih 54.216 (lima puluh empat ribu dua ratus enam belas) hektar berada di seluruh kecamatan wilayah Daerah
 - 2) Kawasan perkebunan dengan luas kurang lebih 26.953 (dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh tiga) hektar yang berada di wilayah Kecamatan Batangan, Cluwak, Dukuhseti, Gabus, Gembong, Gunungwungkal, Jaken, Jekenan, Juwana, Kayen, Margorejo, Margoyoso, Pati, Pucakwangi, Sukolilo, Tambakromo, Tayu, Tlogowungu, Trangkil, dan Winong.
- c. Kawasan perikanan
- 1) Kawasan perikanan tangkap yang dilengkapi dengan sarana penunjang berupa pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan yang berada di Kecamatan Batangan, Dukuhseti, Juwana, dan Tayu.
 - 2) Kawasan perikanan budidaya air payau seluas kurang lebih 10.450 (sepuluh ribu empat ratus lima puluh) hektar yang berada di Kecamatan Batangan, Dukuhseti, Juwana, Margoyoso, Tayu, Trangkil, dan Wedarijaksa.
 - 3) Kawasan perikanan budidaya air tawar seluas kurang lebih 340 (tiga ratus empat puluh) hektar berada di Kecamatan Gabus, Kayen, Margorejo, dan kecamatan lainnya yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- d. Kawasan pertambangan dan energi terdiri atas:
- 1) Kawasan pertambangan mineral meliputi kawasan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan.
 - 2) Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi berupa minyak dan gas bumi yang terdapat di Daerah.
- e. Kawasan peruntukan industri dengan luas kurang lebih 5.650 (lima ribu enam ratus lima puluh) hektar berada di Kecamatan Batangan, Gabus, Gunungwungkal, Jaken, Jekenan, Juwana, Kayen, Margorejo, Margoyoso, Pati, Pucakwangi, Sukolilo, Tambakromo, Tayu, Tlogowungu, Trangkil, dan Wedarijaksa.
- f. Kawasan pariwisata meliputi pariwisata alam, budaya, dan buatan.

- g. Kawasan permukiman terdiri atas:
 - 1) Kawasan permukiman perkotaan dengan luas kurang lebih 12.165 (dua belas ribu seratus enam puluh lima) hektar berada di seluruh kecamatan wilayah Daerah.
 - 2) Kawasan permukiman perdesaan dengan luas kurang lebih 23.295 (dua puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima) hektar berada di seluruh kecamatan wilayah Daerah.
- h. Kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
 - 1) Komando Distrik Militer berada di Kecamatan Pati;
 - 2) Polisi Resort berada di Kecamatan Pati;
 - 3) Pos Angkatan Laut berada di Kecamatan Juwana;
 - 4) Komando Rayon Militer berada di seluruh Kecamatan;
 - 5) Polisi Sektor berada di seluruh Kecamatan;
 - 6) Batalyon Infanteri 410/Alugoro (Kompi senapan); dan
 - 7) Kawasan pertahanan dan keamanan lainnya yang ditetapkan oleh peraturan perundang- undangan.

3.5 Isu-Isu Strategis Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan identifikasi beberapa permasalahan terkait faktor-faktor pendorong maupun penghambat terhadap pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dari sudut pandang Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Pati, sasaran Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, sasaran Renstra DKP Provinsi Jawa Tengah dan implikasi RTRW bagi pelayanan OPD, maka berikut adalah isu-isu strategis yang ditetapkan :

1. Peningkatan Produksi Perikanan baik tangkap maupun budidaya (termasuk garam);
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kelautan dan Perikanan;
4. Peningkatan kualitas lingkungan ekosistem perikanan;
5. Penerapan manajemen mutu dan keamanan hasil perikanan;
6. Peningkatan nilai tambah hasil perikanan;
7. Peningkatan kelas dan kelembagaan kelompok pelaku utama perikanan;
8. Peningkatan perlindungan dan pengawasan sumberdaya perikanan;
9. Perluasan potensi sumberdaya perikanan dalam mendukung peluang usaha bidang perikanan;
10. Peningkatan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mendukung dalam Pengembangan Kawasan Perikanan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, juga merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan jangka menengah yang hendak dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati adalah:

1. Meningkatnya Produksi Perikanan

Tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan ini mempunyai indikator pertumbuhan produksi perikanan baik itu perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.

2. Meningkatnya Konsumsi Makan Ikan

Tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan ini mempunyai indikator Pertumbuhan Angka Konsumsi Makan Ikan.

Sedangkan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati adalah:

1. Meningkatnya produktivitas di sektor kelautan dan perikanan.

Sasaran jangka menengah ini mempunyai 3 indikator kinerja yaitu *Produktivitas tangkap* didapatkan dengan cara membandingkan hasil tangkapan ikan yang dilelang di Tempat Pelelangan Ikan dengan jumlah armada kapal yang menambatkan kapalnya di TPI, *produktivitas budidaya* diukur dengan cara membagi jumlah produksi budidaya total dengan luasan lahan budidaya ikan (tambak, kolam, sawah/ mina padi), dan *produktivitas garam rakyat* dihitung dengan membagi produksi garam rakyat selama musim produksi garam dengan luas lahan tambak garam.

2. Meningkatnya konsumsi ikan perkapita penduduk.

Sasaran jangka menengah ini mempunyai indikator kinerja pertumbuhan angka konsumsi ikan. Angka konsumsi ikan adalah suatu angka yang menunjukkan tingkat konsumsi ikan yang dikonsumsi oleh masyarakat per kapita penduduk selama satu tahun. Untuk perhitungannya angka konsumsi ikan ini dihitung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bersumber dari data SUSENAS.

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati beserta target capaian kinerja selama 5 (lima) tahun dijabarkan dalam Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke- | | | |
|-----|----------------------------------|--|---|---|-------|------|------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Meningkatnya produksi perikanan | | Pertumbuhan Produksi Perikanan | 0,5 | 0,575 | 0,63 | 0,69 |
| | | Meningkatnya produksi perikanan tangkap | Pertumbuhan produksi perikanan tangkap | 0,5 | 0,58 | 0,65 | 0,7 |
| | | Meningkatnya produksi perikanan budidaya | Pertumbuhan produksi perikanan budidaya | 0,5 | 0,57 | 0,61 | 0,68 |
| 2 | Meningkatnya Konsumsi Makan Ikan | | Pertumbuhan Angka Konsumsi Ikan | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 |
| | | Meningkatnya produksi hasil olahan ikan | Pertumbuhan produksi hasil olahan ikan | 2,19 | 2,35 | 2,37 | 2,52 |
| | | | | | | | |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan dalam bentuk upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu tahun 2023-2026 yang dirumuskan dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Rumusan strategi dan arah kebijakan juga memperhatikan pemetaan permasalahan pembangunan dijabarkan pada bab sebelumnya.

Strategi yang akan diambil dalam menjawab permasalahan-permasalahan pembangunan sektor kelautan dan perikanan adalah :

1. Peningkatan produksi dan produktivitas nelayan yang didukung teknologi informasi terpadu dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap;
2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan serta pencegahan konflik;
3. Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan budidaya yang didukung Penggunaan benih dan induk unggul, penerapan teknologi, pemanfaatan lahan, produksi pakan dan lingkungan perairan yang kondusif;
4. Pemanfaatan lahan budidaya untuk Peningkatan produksi garam yang berkualitas, terintegrasi, dan berteknologi;
5. Peningkatan mutu produk dan jaminan keamanan pangan usaha pengolahan dan pemasaran tradisional serta mendorong usaha pengolahan dan pemasaran modern.

Sebagai tindak lanjut dari 5 (lima) strategi, ditetapkanlah arah kebijakan yang lebih bersifat operasional yang diharapkan mampu menyelesaikan akar permasalahan yang dihadapi masyarakat selama ini. Arah kebijakan yang akan diambil dalam 4 (empat) tahun ke depan adalah:

1. Perlindungan kepentingan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, melalui:
 - a. Pembiayaan premi asuransi nelayan
 - b. pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap
 - c. pemberdayaan usaha perikanan tangkap skala kecil
 - d. Fasilitasi pelaksanaan Bansos sembako untuk nelayan kecil
 - e. Fasilitasi pengadaan gunungan untuk upacara adat
 - f. Penguatan kelembagaan nelayan kecil (KUB)
 - g. Peningkatan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI
2. Pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan melalui peningkatan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, dan peningkatan kerjasama antar DKP se Jawa Tengah dan lintas sektoral dalam pengaturan nelayan andon
3. Peningkatan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) dalam Pengawasan dan pembinaan untuk pengendalian eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan

4. Peningkatan mutu produksi perikanan budidaya, melalui:
 - a. peningkatan kemampuan teknis pembudidaya ikan, terutama penerapan Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPIB)
 - b. Intensifikasi budidaya ikan darat dan payau
 - c. pengembangan pakan ikan mandiri berbahan baku lokal
 - d. peningkatan sarana dan prasarana budidaya perikanan
 - e. penerapan dan pemanfaatan teknologi budidaya
 - f. Pengembangan Kawasan Nila Salin
 - g. Pemenuhan kualitas air, keamanan benih dan induk ikan dari hama penyakit dan lingkungan budidaya yang kondusif
 - h. Pelestarian mangrove sebagai penyerap bahan pencemar, penyuplai bahan organik dan sebagai sumber nutrient bagi biota di perairan payau
5. Pemanfaatan lahan budidaya di musim kemarau yang tidak produktif untuk Pengembangan usaha produksi garam melalui integrasi lahan, penerapan teknologi dan tata kelola logistik garam.
6. Optimalisasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, melalui :
 - a. pemenuhan kebutuhan bahan baku ikan segar
 - b. peningkatan promosi konsumsi ikan
 - c. peningkatan produk yang memenuhi jaminan mutu dan keamanan pangan, teknologi, sanitasi dan higien

Uraian terkait dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dirumuskan sebagaimana Tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---------------------------------|---|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Meningkatnya Produksi Perikanan | Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap | Peningkatan produksi dan produktivitas nelayan yang didukung teknologi informasi terpadu dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap | Perlindungan kepentingan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, melalui: a. Pembiayaan premi asuransi nelayan b. pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap c. pemberdayaan usaha perikanan tangkap skala kecil d. Fasilitasi pelaksanaan Bansos sembako untuk nelayan kecil e. Fasilitasi pengadaan gunungan untuk upacara adat f. Penguatan kelembagaan nelayan kecil (KUB) g. Peningkatan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI |
| | | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan, peningkatan kesadaran dalam mengurus izin dan pencegahan konflik | Pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan melalui peningkatan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, dan peningkatan kerjasama antar DKP se Jawa Tengah dan lintas sektoral dalam pengaturan nelayan andon |

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--------|--|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | | Peningkatan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) dalam Pengawasan dan pembinaan untuk pengendalian eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan |
| | Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya | Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan budidaya yang didukung Penggunaan benih dan induk unggul, penerapan teknologi, pemanfaatan lahan, produksi pakan dan lingkungan perairan yang kondusif | <p>Peningkatan mutu produksi perikanan budidaya, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. peningkatan kemampuan teknis pembudidaya ikan, terutama penerapan Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPIB) b. Intensifikasi budidaya ikan darat dan payau c. pengembangan pakan ikan mandiri berbahan baku lokal d. peningkatan sarana dan prasarana budidaya perikanan e. penerapan dan pemanfaatan teknologi budidaya f. Pengembangan Kawasan Nila Salin g. Pemenuhan kualitas air, keamanan benih dan induk ikan dari hama penyakit dan lingkungan budidaya yang kondusif h. Pelestarian mangrove sebagai penyerap bahan pencemar, penyuplai bahan organik dan sebagai sumber nutrient bagi biota di perairan payau |

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|----------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | Pemanfaatan lahan budidaya untuk Peningkatan produksi garam yang berkualitas, terintegrasi, dan berteknologi | Pemanfaatan lahan budidaya di musim kemarau yang tidak produktif untuk Pengembangan usaha produksi garam melalui integrasi lahan, penerapan teknologi dan tata kelola logistik garam |
| Meningkatnya Konsumsi Makan Ikan | Meningkatnya Produksi Olahan Ikan | Peningkatan mutu produk dan jaminan keamanan pangan usaha pengolahan dan pemasaran tradisional serta mendorong usaha pengolahan dan pemasaran modern | Optimalisasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, melalui : a. pemenuhan kebutuhan bahan baku ikan segar b. peningkatan promosi konsumsi ikan c. peningkatan produk yang memenuhi jaminan mutu dan keamanan pangan, teknologi, sanitasi dan higien |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pendanaan dalam bentuk penganggaran, tidak dapat serta merta menjadi penjamin bahwa suatu tujuan atau sasaran dapat dengan mudah dicapai. Oleh karenanya, diperlukan suatu perencanaan yang menyeluruh/ komprehensif, terpadu antar pemangku kepentingan, sinergitas dan aspek keberlanjutan yang ujung-ujungnya dapat membawa masyarakat dan daerah ke arah tujuan yang telah ditetapkan.

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur, sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dana dan lain sebagainya. Kesemuanya itu merupakan masukan (input) yang menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2023 - 2026 adalah sebagai berikut:

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - e) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - a) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - c) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD;
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
 - 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - a) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;
 - b) Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;
 - c) Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan.
 - 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - a) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - b) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - c) Penyediaan bahan logistik kantor;

- d) Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan;
 - e) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - f) Fasilitasi kunjungan tamu;
 - g) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
 - h) Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD;
 - i) Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - a) Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
 - b) Pengadaan mebel;
 - c) Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.
 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat;
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - c) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - a) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
 - b) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.
- B. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
1. Pengelolaan penangkapan ikan di Wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
 - a. Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan;
 - b. Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap;
 - c. Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap.
 2. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil;
 - b. Pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha.
 3. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
 - a. Pelayanan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI).
- C. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
1. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil
 - a. Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil;
 - b. Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
 2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
 - a. Penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
 - b. Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;

- c. Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
 - d. Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
 - e. Pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat;
 - f. Perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat ;
 - g. Perencanaan, dan pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan di darat;
- D. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- 1. Pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota.
 - a. Pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota.
- E. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- 1. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil.
 - a. Penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.
 - 2. Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil.
 - a. Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil
 - 3. Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.

Arah kebijakan dan strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati tahun 2023-2026 yang telah diuraikan pada bab sebelumnya akan diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan sebagaimana tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pati

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra | | Unit Kerja PD Penang- ung- jawab | Lokasi |
|---------------------------------------|---|-----------------|--|--|---|-----------------------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---|---------------|--|-----------------|
| | | | | | | Tahun-1 | | Tahun-2 | | Tahun-3 | | Tahun-4 | | | | | |
| | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Meningkatnya Produksi Perikanan | | | | Pertumbuhan produksi perikanan | (11,66) % | 0,5 | | 0,575 | | 0,63 | | 0,69 | | 0,69 | | | |
| | Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap | | | Pertumbuhan produksi perikanan Tangkap | (17,46) % | 0,5 | | 0,58 | | 0,65 | | 0,7 | | 0,68 | | | |
| | | 3.25.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Pertumbuhan Produktivitas Perikanan Tangkap | (22,25) % | 2,41 | 1.852.124.000 | 2,84 | 1.999.124.000 | 2,92 | 2.081.124.000 | 3,01 | 2.157.065.000 | 3,01 | 8.089.437.000 | | |
| | | | | Cakupan nelayan kecil yang terlindungi | 100 % | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | - | | |
| | | 3.25.03.2.01 | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Waduk, Rawa, dan Genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah kelompok nelayan dan TPI yang memperoleh sarana dan prasarana | 20 unit | 13,00 | 265.003.000 | 13 | 347.003.000 | 13 | 376.003.000 | 14 | 419.944.000 | 14 | 1.407.953.000 | | |
| | | 3.25.03.2.01.01 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 dokumen | 1,00 | 22.000.000 | 1 | 22.000.000 | 1 | 22.000.000 | 1 | 22.000.000 | 1 | 88.000.000 | DKP | 7 Kec. pesisir |
| | | 3.25.03.2.01.02 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia | 7 unit | 1 | 153.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 224.000.000 | 2 | 242.941.000 | 2 | 819.941.000 | DKP | 7 Kec. pesisir. |
| | | 3.25.03.2.01.03 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia | 13 unit | 5 | 90.003.000 | 6 | 125.003.000 | 7 | 130.003.000 | 8 | 155.003.000 | 8 | 500.012.000 | DKP | 7 Kec. pesisir |
| | | 3.25.03.2.02 | Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota | prosentase kelompok nelayan kecil pada level madya | 3 % | 4 | 1.133.474.000 | 5 | 1.198.474.000 | 6 | 1.241.474.000 | 7 | 1.263.474.000 | 7 | 4.836.896.000 | | |
| | | 3.25.03.2.02.02 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan kelembagaannya | 72 kelompok | 78 | 430.994.000 | 84 | 430.994.000 | 90 | 440.994.000 | 96 | 452.994.000 | 96 | 1.755.976.000 | DKP | 7 Kec. pesisir |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra | | Unit Kerja PD Penangg ung- jawab | Lokasi |
|--------|--|---------------------|---|--|---|-----------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|---|-----------------------|--|----------------|
| | | | | | | Tahun-1 | | Tahun-2 | | Tahun-3 | | Tahun-4 | | | | | |
| | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 3.25.03.2.02.03 | Pelaksanaan bantuan fasilitas bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha | Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | 12 unit usaha | 12 | 702.480.000 | 12,00 | 767.480.000 | 12 | 800.480.000 | 12 | 810.480.000 | 12 | 3.080.920.000 | DKP | Kab. Pati |
| | | 3.25.03.2.03 | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Jumlah kapal yang terlayani di TPI | 2.676 unit | 2.676 | 453.647.000 | 2.676 | 453.647.000 | 2.676 | 463.647.000 | 2.676 | 473.647.000 | 2.676 | 1.844.588.000 | | |
| | | 3.25.03.2.03.02 | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 2 layanan | 2 | 453.647.000 | 2 | 453.647.000 | 2 | 463.647.000 | 2 | 473.647.000 | 2 | 1.844.588.000 | DKP | 8 TPI |
| | | 3.25.05 | PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Penyelesaian kasus pelanggaran sumberdaya perikanan | 100 % | 100 | 35.000.000 | 100 | 40.000.000 | 100 | 65.000.000 | 100 | 70.000.000 | 100 | 210.000.000 | | |
| | | 3.25.05.2.01 | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota | Jumlah POKMASWAS yang berperan dalam pengawasan sumberdaya perikanan | 7 Pokmaswas | 8 | 35.000.000 | 9 | 40.000.000 | 10 | 65.000.000 | 11 | 70.000.000 | 11 | 210.000.000 | | |
| | | 3.25.05.2.01.01 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1 | 35.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 65.000.000 | 1 | 70.000.000 | 1 | 210.000.000 | DKP | 7 Kec. pesisir |
| | Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya | | | Pertumbuhan produksi perikanan Budidaya | % | 0,5 | | 0,57 | | 0,61 | | 0,68 | | | | | |
| | | 3.25.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Pertumbuhan Produktivitas perikanan budidaya | % | 0,57 | 3.114.783.000 | 0,61 | 3.189.783.000 | 0,68 | 3.340.785.000 | 0,73 | 3.393.783.000 | 1 | 13.039.134.000 | | |
| | | 3.25.04.2.02 | Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil | Pertumbuhan kelompok pembudidaya ikan kecil | 5 % | 5 | 62.500.000 | 5 | 62.500.000 | 5 | 62.500.000 | 6 | 85.500.000 | 6 | 273.000.000 | | |
| | | 3.25.04.2.02.01 | Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas | 10 kelompok | 8 | 50.000.000 | 8 | 50.000.000 | 8 | 50.000.000 | 8 | 53.000.000 | 8 | 203.000.000 | DKP | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra | | Unit Kerja PD Penangg ung- jawab | Lokasi |
|--------|---------|-----------------|---|---|---|-----------------------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---|----------------|--|----------------|
| | | | | | | Tahun-1 | | Tahun-2 | | Tahun-3 | | Tahun-4 | | | | | |
| | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 3.25.04.2.02.04 | Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 1 kelompok | 1 | 12.500.000 | 1 | 12.500.000 | 1 | 12.500.000 | 2 | 32.500.000 | 2 | 70.000.000 | DKP | |
| | | 3.25.04.2.04 | Pengelolaan Pembudidaya Ikan | Jumlah pembudidaya ikan dan petambak garam yang memperoleh pembinaan, pendampingan serta bantuan sarana dan prasarana | 11.120 orang | 11.231 | 3.052.283.000 | 11.344 | 3.127.283.000 | 11.457 | 3.278.285.000 | 11.572 | 3.308.283.000 | 11.572 | 12.766.134.000 | | |
| | | 3.25.04.2.04.01 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 40.000.000 | DKP | Kab. Pati |
| | | 3.25.04.2.04.02 | Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 9 unit | 10 | 2.401.146.000 | 10 | 2.426.146.000 | 11 | 2.456.149.000 | 12,00 | 2.464.146.000 | 12 | 9.747.587.000 | DKP | Kab. Pati |
| | | 3.25.04.2.04.03 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 13 unit | 15 | 372.137.000 | 17,00 | 397.137.000 | 19 | 447.136.000 | 21,00 | 450.137.000 | 21 | 1.666.547.000 | DKP | Kab. Pati |
| | | 3.25.04.2.04.04 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan | 12 dokumen | 12 | 50.000.000 | 12 | 50.000.000 | 24 | 60.000.000 | 24 | 62.000.000 | 24 | 222.000.000 | DKP | Kab. Pati |
| | | 3.25.04.2.04.05 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | 140 orang | 175 | 159.000.000 | 210 | 184.000.000 | 245 | 200.000.000 | 280 | 210.000.000 | 280 | 753.000.000 | DKP | Kab. Pati |
| | | 3.25.04.2.04.06 | Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi | 225,39 Ha | 226,39 | 30.000.000 | 227,29 | 30.000.000 | 229,29 | 57.000.000 | 231,30 | 59.000.000 | 231 | 176.000.000 | DKP | 7 Kec. Pesisir |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra | | Unit Kerja PD Penangg ung- jawab | Lokasi |
|-------------------------------|---|-----------------|--|---|---|-----------------------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---|-------------|--|---|
| | | | | | | Tahun-1 | | Tahun-2 | | Tahun-3 | | Tahun-4 | | | | | |
| | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 3.25.04.2.04.07 | Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidaya Ikan di Darat | Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | 90 orang | 120 | 30.000.000 | 120 | 30.000.000 | 190 | 48.000.000 | 210,00 | 53.000.000 | 210 | 161.000.000 | DKP | Kec. Juwana, Kec. Batangan, Kec. Wedarijaksa, Kec. Trangkil |
| Meningkatnya Konsumsi Makanan | | | | Pertumbuhan Angka Konsumsi Ikan | 4,08 % | 1,8 | | 1,8 | | 1,9 | | 1,9 | | 1,9 | | | |
| | Meningkatnya Produksi Hasil Olahan Ikan | | | Pertumbuhan Produksi Hasil Olahan Ikan | 11,2 % | 2,19 | | 2,35 | | 2,37 | | 2,52 | | 2,52 | | | |
| | | 3.25.06 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Prosentase pengolah ikan yang bersertifikat | 4 % | 5,02 | 50.000.000 | 5,06 | 60.000.000 | 6,00 | 80.000.000 | 6,06 | 97.000.000 | 6,06 | 287.000.000 | | |
| | | 3.25.06.2.01 | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil | Sebaran wilayah pengolah dan pemasar ikan yang terpantau | 21 Kecamatan | 21 | 10.000.000 | 21 | 10.000.000 | 21 | 10.000.000 | 21 | 15.000.000 | 21 | 45.000.000 | | |
| | | | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko | 1 Dokumen | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 45.000.000 | DKP | Kab. Pati |
| | | 3.25.06.2.02 | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Proporsi Usaha pengolahan ikan yang dibina | 0,40 % | 0,40 | 25.000.000 | 0,47 | 30.000.000 | 0,60 | 40.000.000 | 0,7 | 47.000.000 | 1 | 142.000.000 | | |
| | | 3.25.06.2.02.01 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko | 100 unit usaha | 100 | 25.000.000 | 120 | 30.000.000 | 160 | 40.000.000 | 180 | 47.000.000 | 180 | 142.000.000 | DKP | Kab. Pati |
| | | 3.25.06.2.03 | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota | Jumlah produksi hasil Pengolahan/ikan | 19.724 ton | 20.577 | 15.000.000 | 21.060 | 20.000.000 | 21.560 | 30.000.000 | 22.103 | 35.000.000 | 22.103 | 100.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra | | Unit Kerja PD Penang- gung- jawab | Lokasi |
|------------|---------|-----------------|---|--|---|-----------------------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---|----------------|---|---------------|
| | | | | | | Tahun-1 | | Tahun-2 | | Tahun-3 | | Tahun-4 | | | | | |
| | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 3.25.06.2.03.02 | Pemberiaan Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi | 40 pelaku usaha | 40 | 15.000.000 | 45 | 20.000.000 | 50 | 30.000.000 | 55 | 35.000.000 | 55 | 100.000.000 | DKP | Kab. Pati |
| Non Urusan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.25.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN | Prosentase terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran | 100 % | 100 | 9.436.270.000 | 100 | 9.610.686.000 | 100 | 9.549.843.000 | 100 | 9.626.409.000 | 100 | 38.223.208.000 | | |
| | | 3.25.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 31 Dokumen | 31 | 73.965.000 | 31 | 73.964.000 | 31 | 76.122.000 | 31 | 80.626.000 | 31 | 304.677.000 | | |
| | | 3.25.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 2 | 17.836.000 | 2 | 17.835.000 | 2 | 17.835.000 | 3 | 20.340.000 | 3 | 73.846.000 | DKP | DKP Kab. Pati |
| | | 3.25.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan LaporanHasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 | 7.869.000 | 1 | 7.869.000 | 1 | 7.869.000 | 1 | 9.868.000 | 1 | 33.475.000 | DKP | DKP Kab. Pati |
| | | 3.25.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPDdan LaporanHasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 | 9.560.000 | 1 | 9.560.000 | 1 | 9.560.000 | 1 | 9.560.000 | 1 | 38.240.000 | DKP | DKP Kab. Pati |
| | | 3.25.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 18 Laporan | 18 | 29.500.000 | 18 | 29.500.000 | 18 | 31.658.000 | 18 | 31.658.000 | 18 | 122.316.000 | DKP | DKP Kab. Pati |
| | | 3.25.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah LaporanEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9 Jenis data | 9 | 9.200.000 | 9 | 9.200.000 | 9 | 9.200.000 | 9 | 9.200.000 | 9 | 36.800.000 | DKP | DKP Kab. Pati |
| | | 3.25.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen administrasi keuangan | | | 5.420.928.000 | | 5.424.344.000 | | 5.434.344.000 | | 5.502.406.000 | - | 21.782.022.000 | | |
| | | 3.25.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan TunjanganASN | 48 Orang/bul | 51 | 5.256.422.000 | 51 | 5.256.422.000 | 51 | 5.256.422.000 | 52 | 5.314.422.000 | 52 | 21.083.688.000 | DKP | DKP Kab. Pati |
| | | 3.25.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil PenyediaanAdministrasi Pelaksanaan TugasASN | 30 Dokumen | 25 | 57.506.000 | 30 | 60.922.000 | 32 | 70.922.000 | 35 | 71.992.000 | 35 | 261.342.000 | DKP | DKP Kab. Pati |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra | | Unit Kerja PD Penang- gung- jawab | Lokasi |
|--------|---------|-----------------|---|--|---|-----------------------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---|-------------|---|---------------|
| | | | | | | Tahun-1 | | Tahun-2 | | Tahun-3 | | Tahun-4 | | | | | |
| | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 3.25.01.2.02.03 | Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi KeuanganSKPD | 12 Dokumen | 12 | 100.000.000 | 12 | 100.000.000 | 12 | 100.000.000 | 12 | 107.000.000 | 12 | 407.000.000 | DKP | DKP Kab. Pati |
| | | 3.25.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah LaporanKeuangan Akhir TahunSKPD dan LaporanHasil Koordinasi Penyusunan Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 1 | 7.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 8.992.000 | 1 | 29.992.000 | DKP | DKP Kab. Pati |
| | | 3.25.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 54.000.000 | | - | | 96.000.000 | | 45.000.000 | - | 68.000.000 | | |
| | | 3.25.01.2.05.02 | Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas besertaAtribut Kelengkapan | stel | 80 | 34.000.000 | 80 | | 80 | 34.000.000 | 80 | | 80 | 68.000.000 | DKP | DKP Kab. Pati |
| | | 3.25.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan PegawaiBerdasarkan Tugasdan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugasdan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | - orang | - | - | - | - | 2 | 62.000.000 | - | - | 2 | 62.000.000 | DKP | DKP Kab. Pati |
| | | 3.25.01.2.05.11 | BimbinganTeknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang MengikutiBimbingan TeknisImplementasi Peraturan Perundang- Undangan | - orang | - | 20.000.000 | - | - | - | - | 60 | 45.000.000 | 60 | 45.000.000 | DKP | DKP Kab. Pati |
| | | 3.25.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah pendukung adminstrasi umum perangkat daerah | | | 192.292.000 | | 212.293.000 | | 224.292.000 | | 214.292.000 | - | 843.169.000 | | |
| | | 3.25.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 | 3.086.000 | 1 | 3.086.000 | 1 | 3.086.000 | 1,0 | 3.086.000 | 1 | 12.344.000 | DKP | DKP Kab. Pati |
| | | 3.25.01.2.06.02 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 2 | 20.000.000 | 2 | 25.000.000 | 2 | 35.000.000 | 2,0 | 20.000.000 | 2 | 100.000.000 | DKP | DKP Kab. Pati |
| | | 3.25.01.2.06.04 | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan | 5 Paket | 5 | 110.476.000 | 5 | 110.476.000 | 5 | 110.476.000 | 5,00 | 120.476.000 | 5 | 451.904.000 | DKP | DKP Kab. Pati |
| | | 3.25.01.2.06.05 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 2 | 2.500.000 | 2 | 2.500.000 | 2 | 2.500.000 | 2 | 7.500.000 | 2 | 15.000.000 | DKP | DKP Kab. Pati |
| | | 3.25.01.2.06.06 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 12 | 3.672.000 | 12 | 3.672.000 | 12 | 3.672.000 | 12 | 3.672.000 | 12 | 14.688.000 | DKP | DKP Kab. Pati |
| | | 3.25.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah LaporanFasilitasi KunjunganTamu | 12 Laporan | 12 | 2.820.000 | 12 | 2.820.000 | 12 | 2.820.000 | 12 | 2.820.000 | 12 | 11.280.000 | DKP | DKP Kab. Pati |
| | | 3.25.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan PenyelenggaraanRapat Koordinasidan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 12 | 45.769.000 | 12 | 60.770.000 | 12 | 62.769.000 | 12 | 50.769.000 | 12 | 220.077.000 | DKP | DKP Kab. Pati |
| | | 3.25.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 1 | 1.080.000 | 1 | 1.080.000 | 1 | 1.080.000 | 1 | 1.080.000 | 1 | 4.320.000 | DKP | DKP Kab. Pati |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra | | Unit Kerja PD Penangg ung- jawab | Lokasi |
|--------|---------|-----------------|--|--|---|-----------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---|----------------|--|---------------|
| | | | | | | Tahun-1 2023 | | Tahun-2 2024 | | Tahun-3 2025 | | Tahun-4 2026 | | | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 3.25.01.2.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | 1 | 2.889.000 | 1 | 2.889.000 | 1 | 2.889.000 | 1 | 4.889.000 | 1 | 13.556.000 | DKP | DKP Kab. Pati |
| | | 3.25.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 16.000.000 | | 186.000.000 | | - | | 45.000.000 | - | 247.000.000 | | |
| | | 3.25.01.2.07.02 | Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan | - Unit | - | - | 1 | 25.000.000 | - | - | 1 | 25.000.000 | 1 | 50.000.000 | DKP | DKP Kab. Pati |
| | | 3.25.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | - Unit | 3 | 16.000.000 | - | - | - | - | 4 | 20.000.000 | 4 | 36.000.000 | DKP | DKP Kab. Pati |
| | | 3.25.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | - Unit | - | - | 1 | 161.000.000 | - | - | - | - | 1 | 161.000.000 | DKP | DKP Kab. Pati |
| | | 3.25.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah layanan jasa perkantoran | | | 3.586.857.000 | | 3.586.857.000 | | 3.603.857.000 | | 3.626.857.000 | - | 14.404.428.000 | | |
| | | 3.25.01.2.08.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 12 | 1.000.000 | 12 | 1.000.000 | 12 | 3.000.000 | 12 | 3.000.000 | 12 | 8.000.000 | DKP | DKP Kab. Pati |
| | | 3.25.01.2.08.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik yang Disediakan | 12 Laporan | 12 | 163.400.000 | 12 | 163.400.000 | 12 | 178.400.000 | 12 | 181.400.000 | 12 | 686.600.000 | DKP | DKP Kab. Pati |
| | | 3.25.01.2.08.08 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 12 | 3.422.457.000 | 12 | 3.422.457.000 | 12 | 3.422.457.000 | 12 | 3.442.457.000 | 12 | 13.709.828.000 | DKP | DKP Kab. Pati |
| | | 3.25.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah paket Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 92.228.000 | | 127.228.000 | | 177.228.000 | | 157.228.000 | - | 573.912.000 | | |
| | | 301.1.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan | 73 Unit | 73 | 62.520.000 | 73 | 67.520.000 | 73 | 87.520.000 | 73 | 87.520.000 | 73 | 305.080.000 | DKP | DKP Kab. Pati |
| | | 301.2.22 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor | 1 Unit | 1 | 29.708.000 | 1 | 59.708.000 | 1 | 89.708.000 | 1,00 | 69.708.000 | 1 | 268.832.000 | DKP | DKP Kab. Pati |
| TOTAL | | | | | | | 14.488.177.000 | | 14.899.593.000 | | 15.126.752.000 | | 15.389.257.000 | | 59.903.779.000 | | |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dalam kurun waktu tahun 2023-2026 diukur menggunakan berbagai indikator kinerja. Indikator kinerja ini merupakan target-target capain per tahun yang yang diharapkan dapat tercapai sebagai bahan evaluasi. Secara rinci target capain indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 7.1

Penetapan Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026

| No | Indikator | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD Tahun 0 (2021) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|-----|---|--|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | | | Tahun 1 (2023) | Tahun 2 (2024) | Tahun 3 (2025) | Tahun 4 (2026) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| I | Indikator Tujuan : | | | | | | |
| | Pertumbuhan produksi perikanan | -10,595 | 0,5 | 0,575 | 0,63 | 0,69 | 0,69 |
| | Pertumbuhan Angka Konsumsi Ikan (AKI) | 4,08 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| II | Indikator Sasaran : | | | | | | |
| | Pertumbuhan produksi perikanan budidaya | 0,16 | 0,5 | 0,57 | 0,61 | 0,68 | 0,68 |
| | Pertumbuhan produksi perikanan tangkap | -21,35 | 0,5 | 0,58 | 0,65 | 0,7 | 0,7 |
| | Pertumbuhan produksi hasil olahan ikan | 11,20 | 2,19 | 2,35 | 2,37 | 2,52 | 2,52 |
| III | Indikator Program : | | | | | | |
| | Pertumbuhan Produktivitas Perikanan Tangkap | (22,25) | 2,41 | 2,84 | 2,92 | 3,01 | 3,01 |
| | Cakupan nelayan kecil yang terlindungi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 |
| | Pertumbuhan Produktivitas perikanan budidaya | 0,5 | 0,57 | 0,61 | 0,68 | 0,73 | 0,73 |
| | Penyelesaian kasus pelanggaran sumberdaya perikanan | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 |
| | Prosentase pengolah ikan yang bersertifikat | 4 | 5,02 | 5,06 | 6 | 6,06 | 6,06 |

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 untuk menjabarkan tujuan dan sasaran daerah selama 4 (empat) tahun mendatang. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati mulai Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026;
2. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program.

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IRWANTO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19670911 198607 1 001